

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Apbdes di Desa Bangah

Dinda Eka Wahyu Wardhana Saputri¹, Nadhifa Firtininda Hapsari², Eva Hany Fanida³,
Revienda Anita Fitrie⁴

¹Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

²Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

³Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

⁴Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: 25040674127@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674116@mhs.unesa.ac.id², evafanida@unesa.ac.id³,
reviendafitrie@unesa.ac.id⁴

Article History:

Received: 09 Mei 2026

Revised: 22 Juni 2026

Accepted: 08 Juli 2026

Keywords: *Transparansi, Akuntabilitas, Tata Kelola yang Baik.*

Abstract: *Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi keuangan RT 01 RW 07 Desa Bangah. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang menekankan berbagi informasi dan tanggung jawab publik (Dwiyanto, 2006). Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi laporan keuangan, dan informasi dari pengurus RT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan akuntabilitas dipresentasikan pada rapat tahunan, dan laporan keuangan diberikan kepada grup WhatsApp warga di akhir setiap bulan. Akuntabilitas dicapai melalui proses persetujuan, dan pengurus bertanggung jawab untuk menginformasikan warga tentang bagaimana dana digunakan. Praktik-praktik ini menunjukkan komunikasi yang efektif dan struktur yang jelas, seperti yang direkomendasikan oleh Edward III (1980), berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan. Untuk memastikan praktik transparansi lebih sistematis dan berkelanjutan, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem dokumentasi arsip digital.*

PENDAHULUAN

Tata kelola yang baik adalah inti dari sistem administrasi publik modern. Ini menunjukkan bahwa semua pegawai negeri harus menjalankan tugas mereka secara efektif, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik juga harus diterapkan oleh organisasi masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat, seperti asosiasi warga (RW) dan asosiasi lingkungan (RT). Mereka adalah bagian dari lembaga pemerintah pusat dan daerah. Meskipun berada di tingkat lokal, RT dan RW secara strategis terlibat dalam mengelola berbagai masalah masyarakat, seperti kegiatan sosial, pengembangan lingkungan, dan manajemen dana warga. Iuran

rutin warga seringkali menjadi sumber pengelolaan keuangan lingkungan. Dana biasanya digunakan untuk tujuan bersama, seperti kegiatan sosial, perawatan fasilitas lingkungan, keamanan, dan kegiatan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan dana ini pada dasarnya dikategorikan sebagai pengelolaan dana publik karena digunakan untuk kepentingan bersama. Masyarakat sebagai pihak yang memberikan kontribusi harus memiliki sistem yang transparan dan akuntabel.

Transparansi adalah dasar dari tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi mengacu pada ketersediaan informasi kepada publik tentang berbagai tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang atau organisasi berwenang. Menurut Dwiyanto (2006), transparansi membutuhkan akses informasi yang luas dan mudah diakses agar masyarakat dapat memahami proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya yang diawasi oleh organisasi publik atau pemerintah. Karena transparansi ini, masyarakat dapat melihat bagaimana pegawai negeri melakukan pekerjaan mereka dan bagaimana organisasi yang bertanggung jawab atas kepentingan publik melakukan pekerjaan mereka. Akuntabilitas dan transparansi adalah prinsip tata kelola yang sangat penting. Semua kebijakan, tindakan, dan pemanfaatan sumber daya harus dilaporkan kepada publik oleh manajer pemerintah dan organisasi publik. Akuntabilitas sektor publik membutuhkan sistem akuntabilitas yang jelas untuk manajemen keuangan, mulai dari perencanaan dan implementasi hingga pelaporan kepada pemangku kepentingan, menurut Mardiasmo (2018). Adanya akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai apakah manajemen keuangan telah dilakukan dengan baik, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan lingkungan sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pengelola lingkungan. Ketika informasi tentang pengelolaan keuangan dibagikan secara terbuka dan jelas, publik akan merasa lebih yakin bahwa dana yang mereka sumbangkan benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama. Sebaliknya, jika pengelolaan keuangan tidak transparan, kesalahpahaman, dan ketidakpercayaan publik meningkat. Keadaan ini dapat berdampak pada interaksi sosial antara pengelola lingkungan dan penduduk setempat, serta mengurangi keterlibatan publik dalam upaya lingkungan. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan lingkungan sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pengelola lingkungan. Ketika informasi tentang pengelolaan keuangan dibagikan secara terbuka dan jelas, publik akan merasa lebih yakin bahwa dana yang mereka sumbangkan benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama. Sebaliknya, jika pengelolaan keuangan tidak transparan, kesalahpahaman, dan ketidakpercayaan publik meningkat. Keadaan ini dapat berdampak pada interaksi sosial antara pengelola lingkungan dan penduduk setempat, serta mengurangi keterlibatan publik dalam upaya lingkungan.

Pada kenyataannya, pengelolaan keuangan di tingkat komunitas masih menghadapi sejumlah masalah. Laporan penggunaan dana tidak selalu diserahkan atau dijelaskan secara menyeluruh. Ini merupakan masalah umum yang menyebabkan masyarakat tidak dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan lingkungan. Akibat keadaan ini, harapan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang terbuka dan keadaan sebenarnya mungkin berubah. Sebaliknya, transparansi dan akuntabilitas dapat memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan. Ketika masyarakat tahu tentang pengelolaan keuangan, mereka akan lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Selain itu, keterbukaan informasi dapat meningkatkan rasa solidaritas dan membuat masyarakat lebih memiliki terhadap berbagai program yang dilakukan di lingkungan mereka.

Perkembangan terbaru dalam teknologi komunikasi juga membuka peluang baru untuk

meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan lokal. Penggunaan alat komunikasi digital seperti aplikasi pesan instan memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas. Melalui media ini, pengelola lingkungan dapat menyampaikan laporan keuangan rutin untuk membantu masyarakat mengatur penggunaan dana lingkungan. Hal ini menunjukkan bagaimana kemajuan dalam sistem komunikasi dapat memungkinkan pengelolaan lingkungan yang lebih adil dan jelas. Dari sudut pandang implementasi kebijakan publik, prinsip akuntabilitas dan transparansi bergantung pada banyak hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, selain adanya aturan atau komitmen formal. Menurut Edward III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat komponen utama: struktur organisasi, komunikasi, sumber daya, dan sikap pelaksana. Sangat penting untuk berkomunikasi dengan baik agar publik dapat memahami informasi tentang sistem pelaporan atau kebijakan. Sumber daya yang memadai juga diperlukan untuk mendukung pencatatan keuangan yang baik dan pelaksanaan administrasi. Selain itu, cara pelaksana kebijakan dalam hal administrator lingkungan, melihat manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel.

Di RT 01 RW 07 Desa Bangah, Anda dapat melihat contoh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan lingkungan. Pengurus RT di wilayah tersebut sedang berusaha untuk menerapkan sistem pelaporan keuangan yang terbuka bagi warga. Sebagai cara untuk memberi masyarakat pemahaman tentang cara pemasukan dan pengeluaran dana lingkungan, laporan keuangan dikirim secara rutin ke grup WhatsApp warga setiap akhir bulan. Selain itu, pengurus RT juga mengadakan rapat pertanggungjawaban tahunan yang melibatkan seluruh warga. Rapat ini digunakan untuk menyampaikan laporan keuangan secara langsung dan memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan, saran, dan kritik tentang pengelolaan dana lingkungan. Mekanisme ini menunjukkan adanya upaya di tingkat masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih terbuka dan di mana semua orang dapat berpartisipasi. Adanya forum pertanggungjawaban yang melibatkan warga dan sistem pelaporan yang transparan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi pengelolaan dana lingkungan. Selain itu, praktik ini dapat meningkatkan hubungan antara RT dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan warga terhadap pengelolaan keuangan lingkungan.

Dengan demikian, masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana prinsip transparansi diterapkan dalam pengelolaan keuangan RT 01 RW 07 Desa Bangah, dan (2) bagaimana pengurus RT bertanggung jawab atas dana kepada warga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan keuangan lingkungan dan sejauh mana metode ini dapat membantu tata kelola yang baik di tingkat RT.

LANDASAN TEORI

Kuangan publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan dan sumber daya publiknya. Keuangan publik menganalisis hasil dari kinerja pemerintah melalui kebijakan fiskal, pendapatan dan pengeluaran pemerintah, manajemen utang publik, efisiensi dan efektivitas anggaran, dan bagaimana dampak alokasi anggaran pemerintah terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Keuangan publik menjadi acuan bagaimana pemerintah melakukan pengadaan, pemeliharaan, dan segala pengeluaran yang dilakukan untuk menjalankan tugas. Menurut Harvey S. Rosen dan Ted Gayer dalam bukunya, *Public Finance* disebut juga dengan istilah *Ekonomi Publik*, yang mengatakan bahwa keuangan publik membahas mengenai analisis berbagai pajak pemerintah dan kebijakan pembelanjanya (Jaelani, 2018). Keuangan publik menjadi acuan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil dari keputusan yang diambil pemerintah akan sangat besar dampaknya pada ekonomi dan keuangan rumah tangga dan swasta

di wilayah tersebut. Sehingga penting menganalisis keuangan publik melalui hasil pendapatan, belanja pemerintah, belanja alokasi sumber dana, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan berkaitan dengan konsep keuangan publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, khususnya pada tingkat desa atau lingkungan masyarakat.

1. Konsep Keuangan Publik

Keuangan publik adalah bidang ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan dan bagaimana pendapatan tersebut dialokasikan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pemerintahan, keuangan publik mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah. Dalam praktiknya, keuangan publik adalah instrumen utama pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan kebijakan sosial dan ekonomi. Pengelolaan yang baik dari keuangan publik memungkinkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas umum, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperbaiki infrastruktur, dan mengurangi kesenjangan sosial.

Oleh karena itu, pengelolaan yang baik memungkinkan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial. Untuk memastikan bahwa setiap dana digunakan dengan cara yang paling menguntungkan bagi masyarakat, pengelolaan keuangan publik harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Selain itu, transparansi sangat penting karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan digunakan. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana keuangan pemerintah digunakan. Sebaliknya, prinsip yang tidak kalah penting adalah akuntabilitas, yang berarti bahwa pemerintah atau pihak yang mengelola dana publik harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran secara transparan dan sesuai dengan peraturan.

2. Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Salah satu prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah transparansi. Prinsip ini menekankan betapa pentingnya pemerintah harus transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang proses, kebijakan, dan hasil pengelolaan keuangan publik. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik. Ini menghasilkan hubungan yang lebih transparan antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk berperan sebagai pengamat dan penerima kebijakan. Transparansi, menurut Mardiasmo (2006), didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi tentang operasi pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkannya. Informasi yang dimaksud tidak hanya mencakup laporan keuangan; itu juga mencakup program, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dana publik. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara anggaran disusun, digunakan, dan sejauh mana itu bermanfaat bagi kepentingan bersama. Abdul Hafiz Tanjung (2011) menyatakan bahwa transparansi adalah bentuk keterbukaan pemerintah dan kejujuran kepada masyarakat. Ini didasarkan pada gagasan bahwa orang harus memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh tentang siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang diberikan kepadanya. Keterbukaan ini menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah karena orang dapat melihat secara langsung bagaimana pemerintah melakukan tugas dan

tanggung jawabnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik.

Transparansi juga terkait dengan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi. Informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses akan membuat masyarakat lebih mudah memahami dan menilai kinerja pemerintah. Selain itu, informasi yang terbuka mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses mengawasi pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, transparansi dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan pemerintah. Dalam pemerintahan masyarakat, transparansi juga penting untuk diterapkan. Ini termasuk pengelolaan keuangan RT. Pengurus RT, yang dipercaya oleh warga untuk mengelola dana untuk kegiatan lingkungan, harus menyampaikan informasi keuangan mereka secara terbuka kepada masyarakat. Penyebaran informasi keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyampaikan laporan keuangan secara berkala, mengumumkan penggunaan dana pada rapat warga, atau membagikan laporan bulanan melalui platform komunikasi seperti WhatsApp. Dengan keterbukaan informasi ini, masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana yang mereka berikan digunakan untuk kepentingan bersama, meningkatkan kepercayaan.

3. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Selain transparansi, prinsip penting lainnya dalam pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah atau pengelola anggaran untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak yang diberi amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan laporan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memberikan amanah. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan secara bertanggung jawab. Dalam sektor publik, akuntabilitas sangat penting karena uang yang dikelola berasal dari masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan, penyampaian laporan pertanggungjawaban, serta adanya mekanisme pengawasan oleh masyarakat. Akuntabilitas juga dapat berbentuk pertanggungjawaban vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban kepada pemerintah yang lebih tinggi, sedangkan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah.

4. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah bagian dari sistem keuangan yang digunakan pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup warga desa. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat diwujudkan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban keuangan. Informasi tersebut bisa diumumkan lewat berbagai cara seperti papan pengumuman, pertemuan warga, atau media komunikasi digital. Sementara itu, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan adanya laporan tersebut, masyarakat dapat mengetahui apakah dana yang digunakan telah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga sangat berkaitan dengan keikutsertaan

masyarakat dalam proses pengelolaan uang. Masyarakat bukan hanya sekedar menikmati manfaat, tetapi juga turut serta mengawasi dan memberikan saran terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa atau pengurus lingkungan.

5. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Keuangan Publik atau Desa

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan masyarakat terlibat dalam mengawasi proses tersebut, kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengelolaan uang bisa semakin kecil. Renyowijoyo (2013) menjelaskan bahwa transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Masyarakat dapat terlibat dalam berbagai cara, misalnya dengan menghadiri pertemuan warga, memberi saran atau mengkritik cara pengelolaan uang, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana yang sudah disepakati bersama. Transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau pengurus yang mengelola keuangan publik, serta memastikan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah (1) rancangan penelitian; (2) populasi dan sampel (sasaran penelitian); (3) teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen; (4) dan teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana proses transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Bangah, serta bagaimana praktik tersebut dijalankan oleh aparat desa. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas meng Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung (in-depth interview) dengan informan yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam pengelolaan APBDes di Desa Bangah. Informan dalam penelitian ini yakni bendahara desa yang mengetahui proses pengolahan anggaran desa. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman pertanyaan agar informasi yang diperoleh tetap sesuai dengan fokus penelitian.

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan dokumentasi sebagai data pendukung, seperti laporan iuran bulanan warga, laporan laporan iuran KOS-KOSan warga, dan laporan keuangan. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat dan membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari hasil wawancara, kemudian melakukan reduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan dari informasi yang telah diperoleh. Dengan metode ini, peneliti dapat menjelaskan bagaimana bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Bangah serta kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan RT 1 RW 7 Desa Bangah dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada para pengurus RT. Pembagian Tugas dalam Penelitian ini, (1) Ketua RT: Bapak Samsul Bahari; (2) Wakil Ketua RT: Bapak Hermanto; (3) Sekretaris RT: Bapak Hadi (4) Bendahara RT: Bapak Juni Siswanto. Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi tentang bagaimana transparansi, bentuk

akuntabilitas, media pengumuman anggaran, serta cara pengawasan dalam pengelolaan keuangan di tingkat RT. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara RT, yaitu Bapak Juni Siswanto, prinsip transparansi diterapkan dalam pengelolaan keuangan RT 1 RW 7 Desa Bangah dengan cara memberikan laporan keuangan secara rutin kepada masyarakat. Setiap akhir bulan, laporan pembukuan keuangan dibagikan kepada warga melalui grup WhatsApp yang berisi seluruh warga RT. Melalui media tersebut, warga bisa mengetahui secara langsung detail pemasukan dan pengeluaran yang terjadi setiap bulannya. Pengelolaan dana harus transparan agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana secara terbuka dan tidak ada informasi yang disembunyikan dari warga.

Laporan tersebut juga menjelaskan secara jelas tentang biaya yang dibayarkan oleh warga. Setiap kepala keluarga warga tetap dikenai iuran bulanan sebesar Rp85.000. Iuran tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu Rp30.000 untuk biaya pengelolaan sampah, Rp30.000 untuk biaya keamanan atau pengawasan, Rp10.000 untuk acara malam tirakatan, Rp10.000 untuk jimpitan, dan Rp15.000 untuk kegiatan sosial. 1. Bagi warga kos atau penghuni sementara, iuran yang dikenakan sebesar Rp30.000 per kepala keluarga atau penghuni, yang digunakan untuk biaya pengelolaan sampah. Dengan adanya pembagian yang jelas itu, masyarakat bisa tahu ke mana saja uang yang mereka bayarkan itu digunakan.

Pengurus RT juga menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan selain transparansi dalam bentuk penyampaian laporan secara berkala. Akuntabilitas ini dilakukan dengan cara mengadakan rapat tahunan setiap akhir tahun. Dalam rapat tersebut, seluruh pengurus RT memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada warga. Pembukuan keuangan diinformasikan dan diterangkan dengan jelas kepada masyarakat, sehingga warga dapat melihat langsung bagaimana dana digunakan selama satu tahun. Jika terdapat hal yang dianggap kurang jelas atau menimbulkan pertanyaan, warga dapat langsung menanyakannya pada saat rapat berlangsung. Pengelolaan keuangan di RT 1 RW 7 dilakukan secara transparan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan serta memberikan masukan.

Setiap urusan uang biasanya didiskusikan bersama-sama dengan cara musyawarah agar semua pihak bisa mencapai kesepakatan yang sama. Dengan adanya musyawarah, pengambilan keputusan tidak hanya dilakukan oleh pengurus RT saja, tetapi juga melibatkan warga sebagai bagian dari masyarakat yang ikut berkontribusi dalam iuran tersebut.

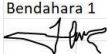
Aplikasi WhatsApp digunakan untuk membagikan laporan keuangan kepada masyarakat. Grup WhatsApp digunakan sebagai sarana komunikasi antara pengurus RT dan warga. Melalui grup tersebut, bendahara RT mengirimkan laporan keuangan setiap bulan, sehingga warga bisa dengan mudah mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan RT. Penggunaan media digital seperti WhatsApp dinilai cukup efektif karena hampir semua warga telah menggunakan aplikasi tersebut, sehingga informasi bisa disampaikan dengan cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Dalam hal pengawasan, warga dan pengurus RT itu sendiri yang bertanggung jawab. Pengurus RT terdiri dari Ketua RT, Wakil Ketua RT, Sekretaris, dan Bendahara yang masing-masing memiliki peran dalam pengelolaan kegiatan RT. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam memantau penggunaan dana tersebut. Laporan keuangan disajikan secara transparan sehingga masyarakat dapat mengakses dan memeriksa rincian pembukuan yang telah dibuat. Jika ada tanda-tanda kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, maka hal tersebut akan dibicarakan bersama melalui musyawarah. Pengurus RT mengatakan bahwa setiap uang yang masuk dan keluar sudah dicatat dengan jelas, sehingga bila ada kesalahan, hal itu mudah terlihat. Pertanggung jawab atas kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang bertanggung jawab, dan mereka wajib memberikan

penggantian kerugian yang terjadi. Selain itu, laporan tersebut juga bisa dilaporkan atau diberitahukan kepada pihak desa bila dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus RT, terlihat bahwa dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan berarti yang menghambat tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini terjadi karena sistem pelaporan yang digunakan berjalan dengan lancar dan masyarakat juga terus aktif membaca serta memperhatikan informasi yang dibagikan oleh pengurus RT. Pengurus RT menyatakan bahwa keterbukaan informasi telah menjadi kebiasaan dalam pengelolaan keuangan sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang signifikan. Secara umum, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di RT 1 RW 7 Desa Bangah sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui laporan bulanan di grup WhatsApp, adanya rapat pertanggungjawaban setiap akhir tahun, serta adanya mekanisme pengawasan yang melibatkan warga secara langsung. Selain itu, penggunaan cara musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah menunjukkan bahwa masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan uang di lingkungan RT.

Secara keseluruhan, pengelolaan uang di RT 1 RW 7 Desa Bangah sudah cukup baik dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui laporan bulanan di grup WhatsApp, adanya rapat pertanggungjawaban setiap akhir tahun, serta adanya mekanisme pengawasan yang melibatkan warga secara langsung. Selain itu, menggunakan metode musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah menunjukkan bahwa masyarakat secara langsung terlibat dalam mengambil keputusan mengenai pengelolaan uang di lingkungan RT.

LAPORAN KEUANGAN RT.01 / RW.07 DESA BANGAH				
Periode Tahun Buku Desember 2025				
Tanggal	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1-Dec	Saldo Pindahan November 2025	Rp 81,684,175	Rp 58,667,155	Rp 23,017,020
8-Dec	MCB alat listrik via pak Adit		Rp 95,000	Rp 22,922,020
14-Dec	Konsumsi +bensin kerja bhakti		Rp 108,500	Rp 22,813,520
20-Dec	Terima Kas dr bpk. Harnang u/ pemasangan pdam	Rp 200,000		Rp 23,013,520
21-Dec	Senar potong rumput 2 pcs+head		Rp 89,500	Rp 22,924,020
25-Dec	Lampu 6 biji via pak Adit		Rp 298,300	Rp 22,625,720
30-Dec	Terima iuran Dari Warga RT 01	Rp 4,425,000		Rp 27,050,720
	Terima iuran dari Kos kosan	Rp 1,440,000		Rp 28,490,720
	Fee dari desa 10% x 950.000	Rp 95,000		Rp 28,585,720
	Jasa pengelola iuran warga Fee 10% dari Rp.6.015.000		Rp 601,500	Rp 27,984,220
	Setor Desa untuk sampah		Rp 950,000	Rp 27,034,220
	Setor jasa Keamanan Kav Polda (P. Anton)		Rp 1,750,000	Rp 25,284,220
	Setor iuran kas Rw 07		Rp 50,000	Rp 25,234,220
	Double bayar bu cepi iuran 2 bulan	Rp 150,000		Rp 25,384,220
	Total	Rp 87,994,175	Rp 62,609,955	Rp 25,384,220
Sidoarjo, 3 Januari 2026				
Bendahara 1				
				
Juni Siswanto				

Gambar 1. Laporan Keuangan RT

Berdasarkan laporan tersebut terlihat bahwa seluruh pemasukan dan pengeluaran dicatat secara rinci. Setiap transaksi ditulis dengan jelas mulai dari tanggal, keterangan kegiatan, jumlah uang masuk, jumlah pengeluaran, hingga saldo akhir kas RT. Misalnya terdapat pengeluaran untuk pembelian alat listrik, konsumsi kerja bhakti, lampu penerangan, pembayaran keamanan, dan setoran sampah. Selain itu terdapat juga pemasukan dari iuran warga, iuran kos, serta bantuan dari warga. Pencatatan yang rinci seperti ini menunjukkan adanya keterbukaan dalam pengelolaan dana sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan uang kas RT secara jelas.

Selain laporan keuangan bulanan, bendahara RT juga membuat data pembayaran iuran warga secara lengkap. Data tersebut menunjukkan warga yang telah membayar iuran setiap bulan sehingga memudahkan pengurus dalam melakukan pendataan dan pengawasan administrasi.

Berikut merupakan data pembayaran iuran warga RT 01 RW 07 Tahun 2025.

Iuran Bulanan Warga RT 01 RW 07 Tahun 2025																
NO	NAMA	ALAMAT	KRT	Bulan												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	B. Anis Riza	DAWIS 1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	B. Anisa Dagiash	DAWIS 1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	B. Anis	DAWIS 1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	B. Anis	DAWIS 1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	B. Anis Surata	DAWIS 1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	B. Enry	DAWIS 1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	B. Nani	DAWIS 1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	B. Supriyanto/Naniul	DAWIS 1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	B. Rosdi	DAWIS 1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	B. Wahyu Budiono	DAWIS 1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	B. Muliada Pika	DAWIS 1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	B. Rini Adi	DAWIS 1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	B. Suci Hamang	DAWIS 1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	B. Rita Arya	DAWIS 1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	B. Halban	DAWIS 1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	B. Putri	DAWIS 1									✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	B. Anis Haradi	DAWIS 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	B. Anlon	DAWIS 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	B. Ali Nyoman/Novi	DAWIS 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	B. Rani	DAWIS 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	B. Lili Budi	DAWIS 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	B. Lina Dharli	DAWIS 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	B. Fitri	DAWIS 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	B. Inowati	DAWIS 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	B. Ratha	DAWIS 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	B. Rena Herman	DAWIS 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	B. Rifa	DAWIS 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	B. Sarah Mukhlis	DAWIS 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	B. Suwanto	DAWIS 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	B. Tiffany	DAWIS 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	B. Litta	DAWIS 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	B. Viera	DAWIS 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	B. Wati Wahyu	DAWIS 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	B. Yuli	DAWIS 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	B. Anggun	DAWIS 3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	B. Alifah Juni	DAWIS 3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	B. Didi Isung	DAWIS 3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	B. Dwi Skarni	DAWIS 3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	B. Inam	DAWIS 3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	B. Jamar	DAWIS 3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	P. Kusni	DAWIS 3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	B. Muli Dipiko	DAWIS 3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	B. Yusi Muliada	DAWIS 3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	B. Oka Fery	DAWIS 3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	B. Rika Longman	DAWIS 3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	P. Ali Usman	DAWIS 3		✓	✓	pindah	pindah	pindah	pindah	pindah	pindah	pindah	pindah	pindah	pindah	pindah
47	B. Novi	DAWIS 3									✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	B. Sahari	DAWIS 3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	B. Ajeng Aditya	DAWIS 4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	B. Cepti	DAWIS 4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	B. Dewi Harmanah	DAWIS 4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52	B. Sri Nani	DAWIS 4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
53	P. Usad	DAWIS 4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
54	B. Rini Hadi	DAWIS 4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55	B. Rosma Ibrahim	DAWIS 4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
56	P. Aziz Kantor	DAWIS 4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
57	B. Sani Inan	DAWIS 4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
58	B. Dabinda	DAWIS 4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
59	P. Zani	DAWIS 4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	B. Wp	DAWIS 4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TOTAL				58	58	57	57	57	57	59	59	59	59	59	59	59
Iuran Bulanan Warga				75,000	4,350,000	4,350,000	4,275,000	4,275,000	4,275,000	4,425,000	4,425,000	4,425,000	4,425,000	4,425,000	4,425,000	4,425,000

Gambar. 2 Data Iuran Warga

Dari data tersebut terlihat bahwa setiap pembayaran iuran warga dicatat secara teratur setiap bulan. Tanda centang pada tabel menunjukkan warga yang telah melakukan pembayaran iuran. Pendataan seperti ini membantu pengurus RT untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pembayaran warga serta mempermudah proses rekapitulasi keuangan RT. Selain itu, warga juga dapat melihat langsung data pembayaran tersebut sehingga tercipta keterbukaan informasi dalam administrasi keuangan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa warga kos atau penghuni sementara memiliki sistem pembayaran tersendiri. Pengurus RT mencatat pembayaran iuran kos secara rinci berdasarkan nama tempat kos dan jumlah pembayaran setiap bulan.

Berikut merupakan data iuran bulanan kos RT 01 RW 07 Tahun 2025.

Iuran Bulanan KOS KOS An Warga RT 01 RW 07 Tahun 2025																
NB	NO	NAMA	ALAMAT	KET	Bulan											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Kos Bu Wansidi	Dawis 1		120000	120,000	120,000	120,000	120,000	90,000	120,000	120,000	120,000	120,000	150,000	120,000
	2	Kos Bu Itik	Dawis 1													
	3	Kos Belakang Laundry	Dawis 1		60000	60,000	60,000	30,000	60,000	30,000	90,000	60,000	30,000	90,000	30,000	60,000
	4	Laundry	Dawis 1		30000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	5	Sembako Madura	Dawis 1		30000	30,000	30,000	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	60,000	30,000
	6	Kos Bu Wahidah	Dawis 1		30000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	7	Warkop Bu Wahidah	Dawis 1		30000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	8	Kos Pak Wisuda	Dawis 1		240000	240,000	240,000	240,000	240,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
	9	Kos Pak Paimo	Dawis 2		125000	150,000	120,000	120,000	120,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	10	Kos Bu Widya	Dawis 3		125000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	125,000	150,000
	11	Kos Pak Yono	Dawis 3		100000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
	12	Kos Pak Antik	Dawis 4		300000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	13	Kos Pak Yusuf	Dawis 4		210000	180,000	240,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	240,000	240,000	240,000	240,000
	14	P. Nur	Dawis 4													
	15															
	16															
	17															
		TOTAL		0									47	47	49	48
		Iuran warga Kos		30,000		1,400,000	1,440,000	1,470,000	1,410,000	1,440,000	1,380,000	1,440,000	1,410,000	1,410,000	1,470,000	1,445,000

Tabel. 3 Data Iuran Kos

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa setiap tempat kos memiliki jumlah pembayaran yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Semua pembayaran dicatat secara rinci setiap bulan sehingga mempermudah pengawasan pemasukan kas RT dari sektor kos-kosan. Pendataan ini menunjukkan bahwa pengurus RT berusaha menjaga keteraturan administrasi keuangan secara menyeluruh, baik dari warga tetap maupun penghuni kos.

Dalam pelaksanaannya, setiap kepala keluarga dikenai iuran bulanan sebesar Rp85.000. Iuran tersebut terdiri dari Rp30.000 untuk biaya pengelolaan sampah, Rp30.000 untuk keamanan lingkungan, Rp10.000 untuk kegiatan malam tirakatan, Rp10.000 untuk jimpitan, dan Rp15.000 untuk kegiatan sosial masyarakat. Sementara itu, penghuni kos dikenai iuran sebesar Rp30.000 yang digunakan khusus untuk biaya pengelolaan sampah. Pembagian iuran yang jelas ini membuat masyarakat mengetahui secara langsung tujuan penggunaan dana yang mereka bayarkan setiap bulan.

Selain transparansi, pengelolaan keuangan di RT 01 RW 07 Desa Bangah juga menerapkan prinsip akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari adanya laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pada rapat tahunan warga. Dalam rapat tersebut, pengurus RT menyampaikan seluruh pembukuan keuangan kepada masyarakat secara terbuka. Warga diberikan kesempatan untuk melihat laporan, memberikan masukan, serta menanyakan hal-hal yang dianggap kurang jelas. Dengan adanya rapat pertanggungjawaban ini, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan dana RT secara langsung.

Pengambilan keputusan terkait penggunaan dana RT juga dilakukan melalui musyawarah bersama. Setiap kegiatan atau pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan lingkungan dibahas terlebih dahulu bersama pengurus dan warga agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Cara musyawarah ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Dalam hal pengawasan, seluruh pengurus RT memiliki tanggung jawab sesuai tugas masing-masing. Ketua RT bertugas mengawasi jalannya pengelolaan organisasi, bendahara bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan, sekretaris membantu administrasi, sedangkan warga ikut berperan dalam memantau penggunaan dana melalui laporan yang dibagikan setiap bulan. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, maka masalah tersebut akan dibahas bersama melalui musyawarah untuk mencari solusi yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus RT, tidak terdapat hambatan besar dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan RT 01 RW 07 Desa Bangah.

Sistem pelaporan yang dilakukan secara rutin serta partisipasi masyarakat yang aktif membuat proses pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Warga juga dinilai cukup peduli terhadap informasi yang diberikan sehingga tercipta hubungan yang terbuka antara masyarakat dan pengurus RT.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di RT 01 RW 07 Desa Bangah telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya laporan keuangan rutin yang dibagikan kepada masyarakat, pencatatan administrasi yang rinci, keterlibatan warga dalam pengawasan, serta adanya rapat pertanggungjawaban tahunan. Penggunaan media digital seperti WhatsApp juga membantu penyampaian informasi menjadi lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya sistem seperti ini, kepercayaan masyarakat terhadap pengurus RT dapat terus terjaga dan pengelolaan dana lingkungan menjadi lebih tertib serta bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di RT 01 RW 07 Desa Bangah, dapat disimpulkan bahwa cara pengelolaan keuangan lingkungan di wilayah tersebut sudah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). Transparansi dan akuntabilitas sebagai dua prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik telah diterapkan oleh pengurus RT melalui berbagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara terbuka mengenai penggunaan dana yang berasal dari iuran warga.

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan RT terlihat dari informasi tentang pemasukan dan pengeluaran dana yang dibuka secara jelas dan disampaikan secara teratur kepada masyarakat. Pengurus RT secara konsisten menyampaikan laporan pembukuan keuangan setiap akhir bulan melalui grup WhatsApp yang terdiri dari seluruh warga RT. Melalui media tersebut, masyarakat dapat mengetahui secara langsung rincian penggunaan dana yang mereka bayarkan setiap bulan. Informasi yang diberikan juga cukup jelas karena mencantumkan berbagai jenis biaya yang dibayarkan oleh warga, seperti dana pengelolaan sampah, biaya keamanan lingkungan, kegiatan tirakatan, jimpitan, serta kegiatan sosial. Dengan adanya penjelasan yang rinci mengenai alokasi dana tersebut, masyarakat dapat memahami dengan lebih baik bagaimana dana yang mereka kontribusikan digunakan untuk kepentingan bersama. Transparansi juga terlihat dari kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai kondisi keuangan lingkungan. Menggunakan media komunikasi digital seperti WhatsApp adalah contoh inovasi yang sederhana, sehingga mempermudah proses memberikan informasi kepada masyarakat. Hampir seluruh warga dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut sehingga proses penyampaian laporan keuangan menjadi lebih cepat dan efisien. Perkembangan teknologi komunikasi bisa digunakan untuk membuat informasi lebih terbuka dalam pengelolaan keuangan di masyarakat.

Selain transparansi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas sudah diterapkan dalam pengelolaan keuangan RT 01 RW 07 Desa Bangah. Akuntabilitas diwujudkan melalui rapat pertanggungjawaban yang dilaksanakan setiap akhir tahun dan dihadiri oleh seluruh warga. Dalam pertemuan tersebut, pengurus RT memberikan laporan keuangan dengan jujur kepada warga dan menjelaskan secara langsung bagaimana uang yang terkumpul digunakan selama satu tahun terakhir. Forum tersebut juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan pertanyaan, saran, atau kritik mengenai pengelolaan dana lingkungan. Ada forum pertanggungjawaban yang menunjukkan bahwa pengurus RT tidak hanya menyajikan laporan keuangan secara tertulis, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memahami

secara lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan lingkungan. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi amanah.

Selain itu, pengelolaan uang di RT 01 RW 07 Desa Bangah juga menunjukkan bahwa masyarakat turut terlibat dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Warga bukan hanya orang yang bayar iuran, tetapi juga bisa mengawasi dan mengevaluasi cara pengurus RT mengurus uangnya. Jika ada hal yang kurang jelas atau membuat bingung, masyarakat bisa bertanya langsung melalui grup WhatsApp atau dalam pertemuan tahunan. Mekanisme ini memungkinkan adanya pengawasan sosial dari masyarakat, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dapat diminimalkan. Pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana juga dilakukan melalui proses musyawarah antara pengurus RT dan warga. Musyawarah adalah cara penting untuk membuat kesepakatan bersama mengenai berbagai kegiatan yang menggunakan dana lingkungan. Musyawarah yang dilaksanakan berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak hanya berasal dari pengurus RT, tetapi juga berdasarkan aspirasi masyarakat secara langsung. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan RT bukan hanya urusan administratif biasa, tetapi juga mencerminkan nilai kebersamaan dan keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di RT 01 RW 07 Desa Bangah telah berjalan dengan cukup baik. Sistem pelaporan keuangan yang dilakukan secara teratur, adanya forum pertanggungjawaban tahunan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan menunjukkan bahwa pengurus RT sudah berusaha mengelola keuangan secara transparan dan bertanggung jawab. Praktik ini juga menunjukkan bahwa prinsip good governance bisa diterapkan bukan hanya di tingkat pemerintahan besar, tetapi juga di tingkat masyarakat yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pengurus dalam mengelola keuangan RT dengan transparan dan akuntabel memberikan contoh yang baik dalam membangun kepercayaan masyarakat. Keterbukaan dalam penggunaan dana dan penggunaan anggaran yang jelas sangat penting untuk memastikan pengelolaan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan warga. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan transparan, pengurus dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar yang terukur. Jika informasi disampaikan dengan jelas dan masyarakat diberi kesempatan untuk memahami serta mengawasi penggunaan dana, maka kepercayaan masyarakat terhadap pengurus lingkungan akan semakin meningkat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa praktik pengelolaan keuangan di RT 01 RW 07 Desa Bangah telah mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang cukup baik. Keterbukaan informasi, pertanggungjawaban yang jelas, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan menjadi faktor penting yang mendukung terciptanya pengelolaan keuangan lingkungan yang lebih tertib, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
- Maulidiya, B. N. (2024). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa (Studi kasus pada Desa Kepuhkembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang). Skripsi Universitas Negeri Malang.

-
- Putri, E. M. (2022). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi empiris seluruh negeri di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok). *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 2(3), 164–184.
- Ritonga, R. (2017). Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid paripurna di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Skripsi, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- United Nations Development Programme. (n.d.). Governance principles. United Nations Development Programme.